

Analisa hukum terhadap penyelesaian surplus material pada proyek pemerintah yang menggunakan kontrak standar FIDIC Plant Design Build : studi kasus pada proyek Contract Package No. 4 - West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. = Legal analysis upon the settlement of Surplus Material on a government project using standard Contracts FIDIC Build Plant Plant Design : case study on the Project Contract Package No. 4-West Java Pipeline Distribution at PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. / Fera Witanti Puspaningrum

Fera Witanti Puspaningrum,author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20335886&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dalam pemulihan ekonomi akibat krisis moneter tahun 1998, pemerintah Indonesia, menerima pinjaman luar negeri dari JBIC untuk pelaksanaan proyek pemerintah melalui perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah Pusat Republik Indonesia dengan perusahaan- BUMD/BUMN. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri serta peraturan pendukungnya. Peraturan ini mengatur tentang pembebasan seluruh kewajiban bea masuk, bea masuk tambahan atas impor barang dan material serta seluruh pajak terkait dengan pelaksanaan proyek pemerintah. Namun demikian peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan impor barang dan material untuk proyek pemerintah belum mengatur masalah yang kritikal yaitu kepemilikan surplus material. Salah satu proyek yang mengalami masalah ini adalah Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, yang menyebabkan perselisihan antara pemilik pekerjaan dan kontraktor. Kontrak tersebut menggunakan kontrak standar FIDIC Plant Design Build, yang menganut sistem nilai kontrak lumpsum. Kontrak standar FIDIC dipergunakan terkait dengan pinjaman luar negeri untuk Proyek CP-4. Tujuan dari tesis ini adalah menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan dan pasalpasal dalam kontrak terkait permasalahan surplus material dengan menggunakan metode studi kasus. Analisa penyelesaian surplus material tersebut menjadi topik utama dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis data dalam menggambarkan kepemilikan surplus material pada proyek pemerintah. Dengan penulisan ini diharapkan dapat dibuat peraturan yang jelas mengenai surplus material dalam proyek pemerintah sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

<hr>

ABSTRACT

In order to support the economic recovery due to the monetary crisis in 1998, Indonesia Government has received foreign or offshore loans from JBIC to develop the government projects through the subsidiary loan agreement between the Government of Indonesia with the state-owned companies BUMD/BUMN. The development of government projects is ruled within Government Regulation Number 42 Year 1995 regarding Import Duties, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods and Income Tax in The Framework of Implementation of Government Projects Financed with Grant or Foreign Loan, and the other supporting regulations. Such regulation is ruling about the exemption of all import duties of goods and materials and all taxes related to development of government project. However the existing prevailing regulation related to the imported goods and materials for government project has not yet regulate the critical issue on the surplus material. One of government project dealt with such issue is Contract Package No. 4 West Java Distribution Pipeline in PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, which was caused dispute between the employer and the contractor. Such contract is using standard contract FIDIC Plant Design Build which is adhere the value system lumpsum contract. The standard contract FIDIC was utilized due to the offshore loan for CP-4 project. The main objective of this thesis is to analyze the implementation of provision or terms and conditions in the related regulations and the Contract regarding the surplus material by using case study method. The analysis of the completion of a surplus of the materials is the main topic in the research that uses the juridical normative approach. Such approach shall be use in data analysis to describe the ownership of surplus material in the government project. Therefore within this thesis, it is being expected that the government may issue a clear regulations regarding surplus material in the government project, therefore these problems do not occur again in the future.